

RELOKASI BERDAMPAK TERHADAP KESEJAHTERAAN DARI SISI KONDISI EKONOMI WARGA KAMPUNG PULO

Pebrianto Syafruddin¹
Isbandi Rukminto Adi²

ABSTRAK

Penelitian ini membahas bagaimana relokasi berdampak terhadap kondisi ekonomi dari sisi pengeluaran keuangan di warga kampung pulo, Jakarta timur. ekonomi menjadi faktor mendasar bagaimana warga kampung pulo tidak ingin pindah ke rumah susun, pengeluaran yang tidak besar hanya sekitar 50.000 – 100.000 perbulan dikeluarkan yang digunakan membayar listrik saja, dan mereka banyak mempunyai usaha rumah kontrakan atau kamar kost. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini didapati bahwa pengeluaran mereka warga kampung pulo menjadi besar sekitar Rp.600.000 – Rp.700.000 perbulan dimana tidak diimbangi dengan pemasukan mengakibatkan pengeluaran menjadi beban, hal ini dikarenakan warga kampung pulo tidak memiliki kemampuan untuk berusaha, berdagang, serta modal yang dimiliki tidak ada, penelitian ini juga mengungkapkan tunggakan yang semakin besar yang tidak dibayar oleh warga dan adanya potensi saling mempengaruhi antara warga agar tidak membayar. Oleh Karena itu warga rusun perlu diberikan pembinaan secara ekonomi agar mereka dapat mandiri, dengan sendirinya mereka akan mencukupi kebutuhannya serta kesadaran bahwa biaya hidup mereka harus menjadi tanggung jawab mereka dan membangun pemikiran memperbaiki kondisi hidup yang layak dan sejahtera.

ABSTRACT

This study discusses how the Relocation impacts the economic condition in terms of financial expenditure in Kampung Pulo, East Jakarta. The economy is a fundamental factor in how villagers do not want to move into vertical housing, the spending of only about Rp.50,000 – Rp.100,000 per month is spent on electricity, and they have many rented house. This research is descriptive research using qualitative approach. The results of this study found that the expenditure of their kampung pulo into a large around Rp.600.000 - Rp.700.000 per month which is not balanced with income causing expenditure to be a burden, this is because villagers do not have the ability to capture business, trade, and owned capital None, this study also reveals the larger arrears that are not paid by citizens and the potential for mutual influence between citizens not to pay. Therefore, the residents of the towers need to be given economic coaching so that they can be self-sufficient, by themselves they will suffice their needs as well as the awareness that their living expenses should be their responsibility and develop thinking of improving decent and prosperous living conditions.

KEY WORDS: *Economy, relocation, welfare*

1 Alumni Program Pasca Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP Universitas Indonesia

2 Staf Pengajar Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP Universitas Indonesia

PENDAHULUAN

Indonesia sedang mengalami perubahan dalam pengembangan ekonominya, sesuai dengan amanat nawacita presiden Joko Widodo mempunyai perhatian dengan membangun dari pinggiran, menyamakan infrastruktur dari sabang sampai merauke untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ekonomi menjadi faktor utama bagaimana suatu kota provinsi dapat berpartisipasi didalam roda pembangunan. Masyarakat berlomba – lomba untuk datang ke ibukota Jakarta untuk mengadu nasib mereka, tidak peduli bagaimana mereka bisa bertahan dan apa pekerjaan mereka. Yang penting mengadu nasib ke Ibukota itu yang terlintas di benak pemikiran masyarakat Indonesia.

Sudah saatnya pembangunan yang tidak merata ini harus diluruskan, bukan menjadi perhatian dikota – kota besar saja tetapi keseluruhan provinsi di Indonesia bila dilihat data dari BPS Jakarta 2015.

Data – data memperlihatkan bagaimana Indonesia masih didominasi pulau jawa sebagai pusat penggerak ekonomi bila dibandingkan provinsi di Indonesia lainnya yang banyak memiliki sumber daya alam seperti minyak, hutan, perkebunan, perikanan. Begi-tu juga dengan sarana dan prasarana pemerintahan bisa dikatakan tidak semaju pulau jawa. Masyarakat pada kenyataannya memiliki pemikiran bahwa pulau jawa ini terutama Jakarta dapat mengubah nasib mereka, dan sebagai indikatornya adalah perubahan dari kondisi ekonomi. Saat mereka datang ke Jakarta dengan hanya bermodalkan niat bisa berubah dan banyak yang tidak memiliki kemampuan, sehingga mereka bekerja apa saja yang penting mereka dapat makan, tempat tinggal yang nyaman dan sehat jauh dari pe-

mikiran mereka, akhirnya mereka menempati ruang terbuka dan daerah pinggiran kali.

Kepadatan penduduk Jakarta tanpa disadari terus meningkat ini menjadi salah satu penyebab tidak berimbangannya pelayanan dan fasilitas untuk masyarakat, bias dipastikan mencari tanah kosong di Jakarta sangat sulit bahkan untuk pemukiman, masyarakat Jakarta yang tidak mampu membeli rumah dikarenakan harga yang tidak terjangkau maka mereka tinggal dibantaran sungai, dalam ketidak berdayaan ini mereka menjadi masyarakat miskin kota.

Kemiskinan di DKI Jakarta menurut data yang dikeluarkan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2015 berada pada angka 3.93 persen, dimana angka ini didapat dari hasil Analisa bagaimana jumlah penduduk miskin di tentukan oleh penetapan garis kemiskinan (GK), pengeluaran dibawah GK berarti termasuk kelompok penduduk miskin. Pada bulan maret 2015 ditetapkan GK di DKI Jakarta sebesar Rp.487.388,-, garis kemiskinan (GK) dibentuk oleh dua kelompok komoditi yaitu makan dan non makan. Pada kelompok makan yang sangat dominan dalam (GK) adalah: Beras, rokok, daging ayam, telur dan mie instan sedangkan kelompok nonmakan seperti: Perumahan, listrik, bensin, pendidikan, angkutan.

Dalam penjelasan diagram diatas bahwa pengeluaran untuk perumahan menjadi masalah terbesar dalam masyarakat kota sehingga mereka berada dalam ketidakberdayaan untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi, maka diperlukan intervensi oleh pemerintah daerah pada khususnya dan pemerintah pusat pada umumnya.

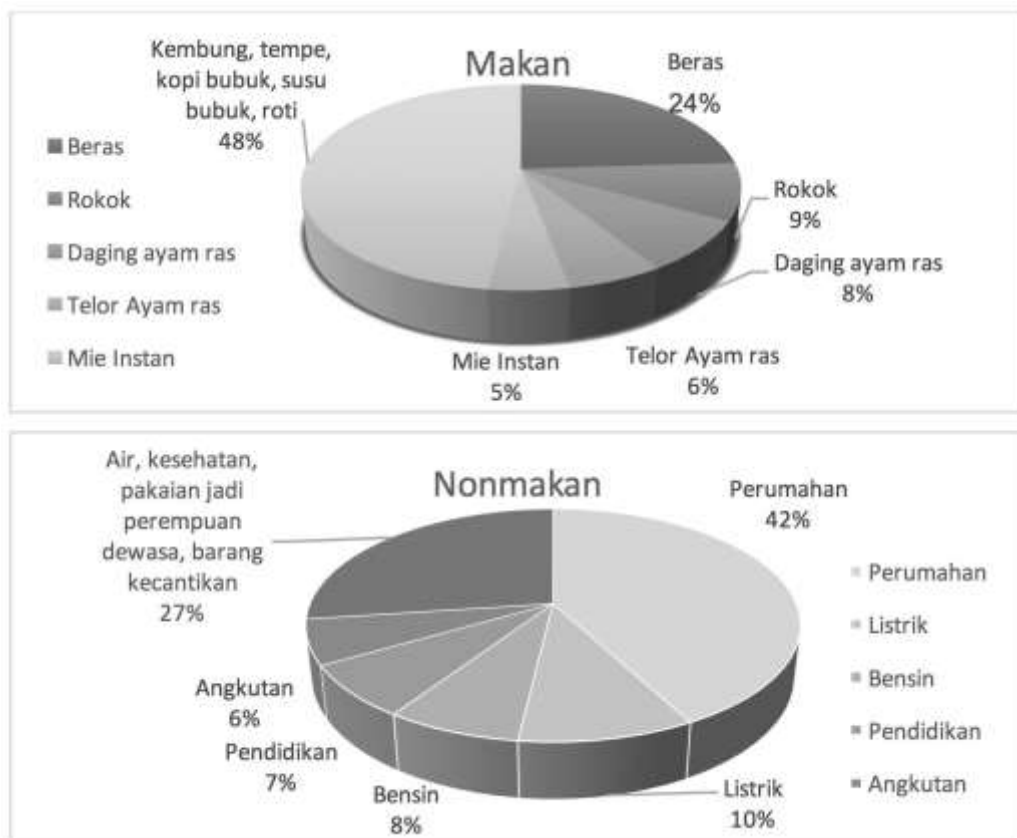
Sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Perumahan dan Permukiman No.10/KPTS/M/1999 tentang Kebijakan dan Stra-

Tabel 1. Perbandingan Perekonomian Regional Pulau Jawa

Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi 2014	Dominasi Ekonomi	
		Sektoral	Kab/Kota/Prov
DKI Jakarta	5,95	Perdagangan	Jakarta Pusat
		17%	24%
Jawa Barat	5,06	Industri pengolahan	Kab Bekasi
		43%	16%
Jawa Tengah	5,42	Industri pengolahan	Kota Semarang
		36%	21%
DI Yogyakarta	5,18	Industri pengolahan	Kab. Sleman
		13%	29%
Jawa Timur	5,86	Industri pengolahan	Kota Surabaya
		29%	27%
Banten	5,47	Industri pengolahan	Kota Tangerang
		34%	25%
Indonesia	5,02	Industri pengolahan	Prov DKI Jakarta
		21%	16%

Sumber: BPS Jakarta 2015

Diagram 1. Kebutuhan komoditi penetapan Garis Kemiskinan



Sumber: BPS DKI Jakarta 2015

tegi Pembangunan Rumah Susun, disebutkan bahwa pembangunan perumahan di kota – kota besar dan metropolitan serta kawasan yang mempunyai kendala secara fisik dalam perluasan kotanya, didorong untuk dilaksanakan ke arah vertikal dalam bentuk rumah susun. Baik rumah susun milik maupun rumah susun sewa, sesuai dengan arahan rencana tata ruang kota yang ada. Selain itu, pembangunan rumah susun sederhana sewa dilakukan dalam menghadapi persoalan permukiman kumuh dan kebutuhan perumahan di DKI Jakarta.

Sejauh ini telah terdapat beberapa Rumah Susun Sederhana Sewa di DKI Jakarta yang sudah beroperasi yang tersebar di 13 lokasi. Terdiri dari 72 blok yang di dalamnya terdapat 6.521 unit, dengan tipe yang dibangun adalah tipe 18, tipe 21, dan tipe 30. Selanjutnya, Rumah Susun Sewa Sederhana yang dibiayai APBD dan belum dioperasikan saat ini terdapat di empat lokasi di DKI Jakarta. Di dalamnya terbangun 1.200 unit dengan tipe yang dibangun adalah tipe 30. Lalu untuk Rumah Susun Sewa Sederhana yang dibiayai APBN dan belum dioperasikan ada di lima lokasi dengan jumlah sebanyak 25 blok, yang terdiri dari 2.500 unit dengan tipe yang dibangun adalah tipe 30. Jika ditotalkan jumlahnya Rumah Susun Sewa Sederhana di DKI Jakarta saat ini ada di 31 lokasi dengan total 143 blok, terdiri dari 13.279 unit. Beberapa diantaranya Rumah Susun Sewa Sederhana yang tak berpenghuni terletak di Marunda, Cilincing, Jakarta Utara dan Pinus Elok di Pulo Gadung, Jakarta Timur. Selain itu, pemerintah pusat bersama perusahaan umum pembangunan rumah nasional (Perumnas) bekerja sama dengan Pemprov DKI untuk membangun Rumah Susun Sewa Sederhana melalui dana APBN. Proyek pembangunan

rumah susun sederhana sewa terus dilakukan pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk memenuhi kebutuhan 70.000 unit per tahunnya. Dalam realita yang terjadi di DKI Jakarta, dari beberapa rumah susun sederhana sewa yang telah terbangun, sebagian besar masih belum berpenghuni. Hal ini terjadi karena salah satu penyebabnya adalah tidak semua golongan masyarakat berpenghasilan rendah memiliki kemampuan dalam menyewa rumah susun yang telah terbangun.

Rumah Susun Sewa tidak hanya berbicara menyelesaikan bencana banjir perumahan kumuh serta kesehatan, tetapi harus secara arif dan bijaksana melihat pokok permasalahan yang akan timbul, apakah pernah terpikirkan aspek sisi sosial bagaimana mereka kehilangan mata pencarian mereka, apakah mereka bisa bertahan hidup dengan membayar uang sewa rumah susun tersebut, sehingga perlu ada kajian mendalam dari sisi ilmu kesejahteraan sosial untuk melihat kebijakan Pemerintah Daerah DKI Jakarta dilihat dari sisi ekonomi terutama pengeluaran. Pengeluaran yang dimaksudkan kehidupan mereka dikampung pulo dan setelah mereka direlokasi kedalam rumah susun sewa sederhana jatinegara.

Kesejahteraan menjadi tujuan bagi masyarakat untuk menuju kehidupan yang lebih baik, oleh sebab itu masyarakat melihat pembangunan yang pesat merupakan salah satu indikator bahwa disana ada penghidupan yang lebih baik terlepas apapun pekerjaan dan kehidupan sehari – harinya. Banyak hal yang diinginkan seperti mendapat penghasilan yang tinggi, mengikuti budaya kota yang selalu tidak ketinggalan dalam segala hal, tempat tinggal yang baik semua menjadi faktor bahwa masyarakat bergerak dari kota atau desa pinggir ke kota metropolitan untuk hidup yang lebih baik.

Perkotaan (*urban*) menjadikan suatu patokan bahwa tingkat suatu ekonomi negara dapat berkembang, Pembangunan pemukiman mengenai tata ruang dan lingkungan menjadi perhatian penting oleh pemerintah, maka penataan ulang lingkungan perlu dilakukan dengan konsep perkotaan yang modern, melihat bagaimana warga dapat tinggal secara layak mendapatkan sarana dasar (air bersih, tempat tinggal, pekerjaan, dan sarana hiburan) seperti singapura yang banyak belajar bahwa lahan tempat mereka tinggal terbatas.

Konsep perkotaan yang modern yang diungkapkan oleh Edelman and Triantafillou (2013): *“The theme of the conceptual plan is ‘Innovative Sustainable Urbanism’. Its strength is that it departs from conventional modernist planning principles, and, instead, it attempts to develop smaller scale, humane and sustainable building blocks at the residential level.”* (Tema rencana konseptual adalah ‘Inovatif / Sustainable Urbanism’. Kekuatannya adalah bahwa hal itu berangkat dari prinsip-prinsip perencanaan modernis konvensional, dan, sebaliknya, ia mencoba untuk mengembangkan skala yang lebih kecil, blok bangunan manusiawi dan berkelanjutan pada tingkat hunian.)

Pemilihan tata letak dan konsep yang diutarakan, dalam penelitian dengan pemukiman yang baik dalam suatu negara dapat menghasilkan masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang sejahtera dapat membantu mendorong perkembangan ekonomi, sosial dan budaya, bertransfer dengan pengetahuan yang ada menciptakan kesempatan serta membuat peluang yang dapat meningkatkan serta berkelanjutan dalam pembangunan.

Maka dari itu kesejahteraan bila diartikan secara harfiah mengandung makna yang luas dan mencakup berbagai segi pandang ilmu

atau nilai-nilai bahkan ukuran yang menjadi sifat utama dari pengertian itu, Kesejahteraan menurut Tiwari (2012), Hal yang diungkapkan Tiwari disebut individu itu sejahtera apabila didapatkan yang disebutkan kesehatan dan kesejahteraan dimana didalamnya termasuk makanan, pakaian, perumahan, perawatan kesehatan serta pelayanan sosial, sehingga dalam konteks kesejahteraan yang dimaksud oleh penelitian ini bagaimana masyarakat mendapatkan standar kehidupan yang memadai kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarga, mendapatkan fasilitas sesuai standar pemenuhan kebutuhan hidup sehari – hari, perpindahan yang diberikan penggantian rumah susun diharapkan dapat memberikan dampak sejahtera dan memberikan harapan hidup yang panjang

Kesejahteraan sosial terbagi-bagi, ada program-program pemerintah juga dikenal sebagai kesejahteraan sosial negara atau kesejahteraan sosial berdasarkan undang-undang, dan di lain sisi terdapat juga kesejahteraan sosial yang tidak berdasarkan undang-undang (informal), usaha kesejahteraan sosial nonformal terdiri atas banyak kegiatan harian yang meningkatkan kesejahteraan individu, keluarga dan komunitas (Fahrudin 2012), Kesejahteraan keluarga adalah suatu keadaan aman, tentram, sejahtera, karena terpenuhinya kebutuhan keluarga baik kebutuhan ekonomi maupun kebutuhan sosial. Dengan kata lain bahwa kesejahteraan keluarga adalah keselarasan antara sesuatu yang diinginkan dapat dicapai atau diraih dengan pengorbanan yang dilakukan. Sedangkan James Midgley mengartikan Kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi dalam suatu masyarakat: *“a state or condition of human well being that exists when social problems are managed, when human needs are met,*

and when social opportunities are maximized” suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik: ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalkan (Midgley dalam Adi, 2015).

dalam kesejahteraan masyarakat negara harus hadir dikutip dari Martin and Pimental (2014)

“Many factors since the 1970s have contributed to the changes that have taken place within the structure of the welfare state according to Marxists (Melman, 2001). These would include: (1) the shift of workers from the manufacturing sector to the service sector; (2) the increasing demands placed on the welfare state by women; and (3) economic globalization and its impact on the amount of capital that the welfare state has available to fund itself”

Banyak faktor sejak tahun 1970 yang telah berkontribusi merubah dan terjadi dalam struktur negara kesejahteraan menurut Marxist (Melman 2001), yang mencakup: 1. Pergeseran pekerja dari sektor manufaktur ke sektor jasa, 2. Meningkatnya tuntutan ditempatkan wanita dalam peran kesejahteraan, 3. Globalisasi ekonomi dan dampaknya terhadap jumlah modal dimana negara kesejahteraan dapat mendanai mereka sendiri. Sehingga kesejahteraan tidak terlepas dari faktor ekonomi.

Dalam penelitian ini melihat dari beberapa konsep yang diungkapkan bahwa kesejahteraan yang dimaksudkan adalah bagaimana warga yang setelah direlokasi mendapatkan penghidupan yang layak. Kesejahteraan tidak hanya dipandang dipindahkan atau relokasi

tetapi memerhatikan aspek kesejahteraan sosial dimana pemerintah dapat hadir dengan bagaimana program – program yang berka-itan dengan peningkatan ekonomi masyarakat terpenuhi sehingga bentuk tercapainya masyarakat yang sejahtera merupakan rangkaian yang berkelanjutan. Penelitian ini melihat dari penjelasan yang diungkapkan oleh Martin dan Pimental bahwa faktor – faktor ekonomi sangat berperan didalam perubahan, pengertian kesejahteraan atau negara sejahtera dimana didalamnya ada kelas – kelas terbagi sehingga kesejahteraan yang dimaksud bagaimana masyarakat dapat bekerja dan menghasilkan sehingga menggeser pergerakan ekonomi, sedangkan Hokenmajer melihat kesejahteraan tergantung bagaimana suatu negara memprioritaskan apa yang di tentukan dan diperlukan untuk masyarakatnya yang cocok dan tidak bersandar pada ekonomi saja tetapi banyak faktor seperti demografi, budaya dan kepercayaan. Penelitian ini menyimpulkan kesejahteraan yang dimaksud adalah melihat bahwa faktor ekonomi membawa pengaruh bagaimana masyarakat bisa dikatakan sejahtera saat setelah dilakukan pemindahan pemukiman atau relokasi, relokasi dipilih sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah masyarakat yang tinggal dibantaran kali yang terkena penataan lingkungan.

METODE

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak relokasi terhadap kesehatan dengan cara mengumpulkan data dan informasi untuk dapat dianalisa secara mendalam, sehingga pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam menjelaskan gejala sosial yang timbul dapat digambarkan dengan terperinci dengan data dan serangkaian tahapan atau langkah, maka

dalam penelitian ini menggunakan jenis metode deskriptif, menurut Neuman (2011) penelitian deskriptif “menyajikan gambaran yang spesifik mengenai situasi, penataan sosial, atau hubungan. Menyajikan gambaran menyelidiki persoalan baru atau menerangkan alasan terjadinya suatu hal”. Fokus dari deskriptif menjelaskan bagaimana gejala sosial dibentuk dan diberi makna.

Lokasi dalam penelitian ini berada di DKI Jakarta Indonesia, rumah susun sederhana sewa Jatinegara Barat Jakarta Timur, dikarenakan ini merupakan percontohan awal pemerintah daerah memindahkan atau relokasi ke rumah susun sewa sederhana yang berdekatan dengan pemukiman awal, dimana pada awalnya mereka bermukim dan menempati lahan di pinggir kali ciliwung yang terkena dampak pelebaran sepanjang 6 meter, lokasi yang mereka tempati selalu berlangganan banjir dikala musim hujan dan kiriman air dari bogor dan sekitarnya sehingga dipindahkan tidak jauh dari pemukiman awalnya hanya berpindah keseberang kali, dan saat ini warga yang menempati rumah susun sewa Jatinegara Barat pindahan warga dari kampung pulo Jakarta Timur, yang tercatat dalam data UPT rusun Jatinegara Barat sebanyak 518 kepala keluarga (UPT Jatinegara Barat 2016).

Penetapan informan yang dipilih untuk memberikan informasi yang valid dan sesuai dengan fakta dilapangan, melibatkan beberapa informan dengan kriteria, pertama diantara informan memiliki gambaran mengenai relokasi pembuat kebijakan sampai pelaksana dilapangan yang berasal dari kalangan birokrat pemda DKI yaitu Gubernur, kepala dinas gedung dan perumahan dan upt jatinegara barat, kedua informan yang berkaitan yang terkena dampak relokasi yaitu warga kampung pulo ke rumah susun sederhana

sewa Jatinegara Barat, serta informan warga yang kurang dan tidak sanggup membayar uang sewa.:

1. Gubernur DKI Jakarta.
2. Kepala Dinas Gedung dan Perumahan DKI Jakarta.
3. Kepala UPT (unit pelaksana teknis) Jatinegara Barat.
4. Warga Rumah susun sewa Jatinegara barat eks kampung pulo.

Pemilihan informan dalam penelitian ini merupakan teknik penarikan sampel non probabilita, dengan menggunakan purposive sampling.

Untuk memperoleh informasi dan data yang reliable dan valid dalam penelitian kualitatif maka dalam penelitian ini perlu dilakukan pengambilan data menggali informasi kepada informan, dengan cara sebagai berikut:

1. Studi Literatur

Studi literatur dilakukan agar mendapatkan perbandingan, literature Rubin & Debbie (2010), kajian literature dalam penelitian harus membawa pembaca kepada informasi yang terkini pada penelitian sebelumnya, dan harus menunjukkan gambaran umum atau perbedaan pendapat di antara para peneliti sebelumnya. Data perbandingan didapatkan dari hasil laporan, dokumentasi yang pernah dilakukan.

2. Observasi

Observasi yang diungkapkan oleh Rubin & Debbie (2010), dalam metode ilmiah dalam mencari bukti kebenaran dengan cara melakukan pengamatan sebagai dasar untuk pengetahuan, pengamatan menurut Neuman (2011) adalah pengamatan penelitian dilapangan secara terperinci hal – hal yang dili-

Tabel 2. Rekapitulasi Tunggakan Sewa Rumah Susun Sewa Sederhana Jatinegara Barat Per bulan Maret 2017

No	Jumlah Tunggakan	Jumlah Unit	Sewa	Air	Denda	Jumlah Tunggakan
1	14 Bulan	1	4.200.000	698.000	546.000	5.444.000
2	13 Bulan	2	7.800.000	1.522.000	936.000	10.258.000
3	12 Bulan	3	10.800.000	3.734.500	1.218.000	15.752.500
4	11 Bulan	3	9.900.000	1.627.000	1.044.000	12.571.000
5	10 Bulan	8	24.000.000	9.971.500	2.202.000	36.173.500
6	9 Bulan	13	35.100.000	11.218.500	2.868.000	49.186.500
7	8 Bulan	24	57.600.000	19.386.000	4.074.000	81.060.000
8	7 Bulan	22	46.200.000	13.711.000	2.898.000	62.809.000
9	6 Bulan	42	75.600.000	26.430.000	3.942.000	105.972.000
10	5 Bulan	48	72.000.000	18.448.000	2.994.000	93.442.000
11	4 Bulan	77	92.400.000	40.998.500	2.886.000	136.284.500
12	3 Bulan	76	68.400.000	24.352.500	1.482.000	94.234.500
13	2 Bulan	61	36.600.000	10.815.500	408.000	47.823.500
14	1 Bulan	54	16.200.000	5.263.500	24.000	21.487.500
Jumlah		434	Rp.556.800.000	Rp.188.176.500	Rp.27.522.000	Rp. 772.498.500

Sumber: UPT Jatinegara

hat, didengar dan yang dapat ditulis menjadi sebuah catatan. Sehingga obeservsi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan pengamatan secara langsung setiap kegiatan yang dilakukan oleh sumber informasi baik dalam perilaku, ucapan, serta kebiasaan yang dilakukan.

3. Wawancara

Dalam pengumpulan data diperlukan wawancara terhadap informan , wawancara yang dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam (in depth interview), yang menurut Taylor, Bogden, Devault (2016):

“By in-depth qualitative interviewing, we mean face-to-face encounters between the researcher and informants directed toward understanding informants’ perspectives on their lives, experiences, or situations as expressed in their own words”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi ekonomi yang seharusnya tidak berubah dikarenakan relokasi kampung pulo

merupakan proyek percontohan dimana di-kawasan kumuh Jakarta dilakukan relokasi yang tidak jauh dari tempat tinggal asal mereka. Tetapi data dilapangan memperlihatkan bahwa tunggakan sebesar Rp. 772.498.500 yaitu terdiri dari tunggakan sewa unit sebe-sar Rp. 556.800.000, air Rp. 188.176.500 dan denda Rp. 27.522.000 (sumber UPT Rusuna-wa Jatinegara Barat):

Ada bebarapa hal dapat ditarik kesimpulan Ini memperlihatkan kondisi ekonomi mereka yang menurun dikarenakan mereka kehilangan mata pencarian mereka seperti berdagang, yang selanjutnya mereka dalam posisi kece-wa karena tidak mendapatkan ganti rugi se-hingga mereka menolak untuk membayar hal tersebut saat digali kedalam beberapa infor-man selalu didapatkan sewaktu Bpk. Jokowi menjadi gubernur semua akan diganti sampai kandang ayam, begitu berubah kepemimpinan-an berubah juga kebijakan hal tersebut yang diutarakan oleh beberapa warga.

Kondisi ekonomi menjadi perhatian utama bagi warga kampung pulo dikarenakan sistem relokasi ini tidak menggunakan sis-

tem ganti rugi dikarenakan mereka dianggap menempati tanah pemerintah daerah Jakarta dan berada dalam pemetaan tata lingkungan. Karena berada di lingkungan pinggir kali, penggantian berdasarkan petabidang yang artinya setiap satu unit rumah diganti dengan satu unit rumah susun sewa sederhana. Sedangkan warga di kampung pulo menjadikan rumah kontrakan lahan pemasukan mereka (dalam satu rumah terdiri dari dua tingkat dimana tingkat dua dijadikan kamar sewa atau kontrakan yang rata – rata harga sewanya sekitar Rp. 400.000) seperti pengakuan bapak SRD “Bapak malah juga punya kontrakan, ada tiga pintu sebelum ada warung juga di kampung pulo sama kontrakan, Kontrakan-kan sering banjir asal laku aja sekitar 400.000 listrik bapak yang kasih tapi biasanya dikasih uang listrik juga, biasanya 50.000” .

Kondisi Ekonomi dilihat dari sisi kemampuan pembayaran sewa, sesuai perintah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, warga yang tinggal di Rumah Susun Sederhana Sewa Jatinegara digratiskan selama 3 bulan. Setelah itu, warga dipungut biaya Rp 300.000,- per bulan untuk Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL). Sedangkan untuk air dan listrik, warga mengeluarkan biaya sendiri sesuai kebutuhan. “Di bulan keempat dan seterusnya, tiap unit membayar Rp 300.000,- se-hingga kebutuhan perbulan bila dirinci listrik dan air sekitar Rp 300.000 – Rp 350.000,- dan menjadi beban tetap setiap bulannya sekitar Rp 600.000 – Rp 700.000,-. Itu juga untuk keperluan operasional, seperti lift, kebersihan, keamanan, dan sebagainya. di luar air dan listrik. Listriknya 900 watt pakai pulsa, hal tersebut memberatkan warga karena pengeluaran mereka yang seharusnya hanya 30% dari pendapatan bisa mencapai 50 – 60 % se-hingga berpotensi gagal bayar uang sewa dan

tidak berdaya dikarenakan pengeluaran di kampung pulo sebelum direlokasi hanya sebesar Rp 200.000,- untuk bayar listrik. lebih dari 50% mereka kehilangan pekerjaannya setelah pindah kerumah susun dikarenakan pekerjaan mereka adalah pemilik kontrakan dan berjualan warung kelontong (berdasarkan interview dengan warga rusunawa).

Angka beban pembayaran yang dikeluarkan oleh UPT jatinegara dapat juga dikarenakan keadaan ekonomi bisa juga disebabkan ketidakmauan untuk membayar oleh warga rusun, efek yang diciptakan adalah pengaruh kehidupan sosial mereka yang saling mempengaruhi karena dipastikan mereka kondisi ekonomi sebagai indikatornya mempunyai kendaraan bermotor, mempunyai TV dan ada beberapa unit menggunakan AC, untuk pekerjaan berdasarkan informasi dari pengelola warga ada yang mempunyai pekerjaan formal seperti bekerja diperbankan, TNI, PNS, dan tukang daging serta penjual di pasar jatinegara

Berdasarkan informasi informan yang didapatkan di lapangan, dapat menjawab hasil penelitian yang dilakukan bagaimana relokasi berdampak pada pengeluaran dalam sisi kesejahteraan warga kampung pulo, informan yang pertama keluarga dari Ibu WRI, kehidupan di kampung pulo mempunyai pemasukan yang baik “ Tidak apa – apa harapkan bapak aja, ada hati pengen usaha tapi usaha apaan, paling bantuin bapak tas, dulu bapak punya konveksi disini sendirian bapak. Me-sin ada nih buka usaha betulin tas” ibu WRI beserta suaminya mempunyai usaha konveksi dimana di rumah mereka kampung pulo memiliki dua tingkat, tingkat dua dijadikan tempat usaha membuat tas sekolah dan dimasukkan di pasar jatinegara, mereka mempunyai karyawan untuk membantu usahanya tersebut. Ibu WRI didalam unit rusun memi-

liki 6 jiwa hidup bersama menantunya, hal lain diungkapkan tentang kemerosotan daya ekonomi keluarga mereka “Pertama pemasukan banyak pengeluaran kurang, disini pengeluaran gede pemasukan ngga ada” suami sekarang kerjanya penjahit untuk menambah – nambah penghasilan membuka perbaikan tas dan penjualan tas yang sudah selesai dibuatnya, sedang ibu tidak bisa membantu bapak Karena tidak punya modal untuk usaha dan yang diungkapkan bahwa “Ibu mah di-sini ngga bisa apa – apa, mau dagang coba liat dagangnya sama semua, yang beli kaga ada juga yang dagang banyak, hati sih pingin dagang tapi liat kenyataan sama aja”.

Ibu WRI dan bapak ini tidak tersentuh dan terlihat dengan kemampuan mereka di bidang konveksi, sehingga begitu mereka direlokasi berakibat putus modal, penyebab utama ekonomi mereka tidak dapat bergerak dan cenderung menurun, seperti diungkapkan “Emang usahanya tukang jahit tapi dulu ada anak buah nih karena ngga punya modal nyari bahan sampai tanah abang, gratis juga naik bus way, tasnya banyak ukurannya, hasil ini serabutan hasil ini buat dapur aja. Sekarang tidak punya modal”.

Informan yang kedua adalah keluarga SRD, keluarga ini sebenarnya dikampung pulo hanya mengandalkan rumah kontrakan dan sewa dimana kontrakan yang dimilikinya ada tiga yang harga sewanya sekitar Rp. 400.000, dalam kondisi relokasi selama dua bulan bapak SRD kehilangan arah dan mengalami stress seperti yang ia ungkap “ Bukan stress lagi mas, marah juga pikiran udah rumah kita dibongkar tidak dibayar kembali kepulo cuma bisa hancur tempat kita istirahat didalam dari kecil bayangin udah hancur, tidak rumah untuk keatas udah di bongkar, dalam hati ngapain sih nih pindah kerusun bengong juga kita tidak usaha, kesana kemari tidak jelas, nongkrong diluar perasaan malu orang pada berangkat kerja pada berangkat dagang kita malu, akhirnya bapak main ke-rumah anak, sampai sana inget lagi balik lagi kesini” keluarganya tidak mempunyai penghasilan, tetapi di bulan kedua setelah pindah pihak UPT rusun membuka pendaftaran untuk berdagang yang hasilnya diberikan tempat dagang seperti etalasnya:



Gambar 1. Keluarga membuka service tas dan tas yang diproduksi oleh ibu dan bapak WRI

Sumber: Dokumentasi penelitian



Gambar 2. Keluarga berdagang dilantai 2 Rusun
 Sumber: Dokumentasi penelitian

Keadaan yang tidak mampu berubah menjadi baik, bermodal Rp.150.000 bapak SRD terus berdagang melihat kesempatan, dengan cara apa yang dicari pembeli yang diwarungnya belum ada dicatat lalu dibelinya dipasar jatinegara dan ia juga melakukan azas kepercayaan dibiarkan marketing produsen makanan menitip makanannya seperti wafer, kue, kerupuk, es krim, dan lain – lain. Pengalamannya berdagang tidak terus menerus laku pernah selama dua hari dia menjaga tetapi tidak ada satupun yang membeli. Niat dan kerja keras bapak SRD mendapatkan hasil selama kurang lebih mendekati dua tahun kini warungnya sudah berkembang dan mempunyai penghasilan sekitar 200.000 – 400.000 sehari sedangkan pengeluarannya yaitu uang dapur dan anak masih sekolah satu orang se-

kitar 60.000 – 80.000 perhari, seperti yang dikatakan dalam usaha itu dijalani saja mas. Rasa kecewa terhadap pemda DKI sudah sedikit hilang karena manfaat yang ia rasakan. Pengharapan terakhirnya yaitu ganti rugi, tanah seluas kurang lebih 100m² yang kisaran nya saat ini per meter adalah Rp.1.000.000 diwilayah kampung pulo yang direncanakan ingin membeli rumah di sekitar bogor.

Informan yang ketiga adalah Ibu NR, di kampung pulo ibu merupakan pekerja menjaga toko dipasar jatinegara, tetapi setelah direlokasi ibu harus merelakan pekerjaannya untuk mengurus ibunya yang terkena strok saat mengetahui bahwa mereka terkena relokasi, ibu NR dalam unitnya memiliki 4 jiwa diantaranya dua lansia dan satu anaknya yang masih sekolah SMK, saat ini ibu mendapat bantuan dari sodaranya untuk membayarkan unit rusun dan air, ia telah menunggak seperti stiker yang ditempel di depan pintunya, seperti gambar 3. berikut:



Gambar 3. Stiker tunggakan
 Sumber: Dokumentasi Penelitian

Saat ini ibu memiliki tunggakan air 6 bulan sebesar Rp 2.533.500, sangsi yang dibebankan hanya pemanggilan dan penempelan stiker oleh pengelola (UPT), di rumah susun dalam pemberian sangsi sampai tingkat pengeluaran paksa warga dari unitnya diperlu-

kan izin sampai dinas perumahan dan gedung pemda DKI Jakarta, bila dilihat didalam unitnya memang tidak ada satupun benda elektronik seperti TV, kulkas hanya tempat tidur.

Untuk menganalisa informasi informan digunakan konsep dari James Midgley (Midgley dalam Adi, 2015) dan Tiwari (2012). informan yang menjadi subyek penelitian ini diwawancara secara mendalam dan didapatkan pula informasi mengenai dampak relokasi dari sisi kondisi ekonomi digunakan konsep James Midgley, mengartikan Kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi dalam suatu masyarakat: *“a state or condition of human well being that exists when social problems are managed, when human needs are met, and when social opportunities are maximized”* suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik: ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalkan (Midgley dalam Adi, 2015), kondisi yang didapatkan secara fisik mengalami perubahan dan menjadi baik, tetapi untuk ekonomi keluarga dari ibu WRI mengalami penurunan ekonomi terukur dari pendapatan yang ia dapatkan tergerus oleh pengeluaran, sedangkan ekonomi keluarga hanya di to-pang oleh suami yang bekerja pada orang lain dengan pendapatan tidak menentu, relokasi menjadikan kesempatan sosial dapat digunakan dengan baik tetapi permasalahan yang timbul tidak dapat dikelola, saat itulah sebenarnya peran pemerintah daerah DKI Jakarta dapat memberikan intervensinya membantu dalam permodalan bahkan mencarikan pasar untuk ibu WRI agar permasalahan sosial mereka dapat dikelola dengan baik dan terpenuhinya kebutuhan dasar mereka, sedangkan informan yang kedua bapak SRD sudah men-

dapatkan kondisi ekonomi yang baik setelah dilakukan relokasi dimana ditemukan bahwa usaha yang ia kelola mendapatkan keuntungan yang lumayan sekita Rp. 200.000 – Rp 400.000 sehari, dapat menyisihkan uangnya untuk menabung sehingga persolaan sosial yang timbul setelah relokasi bisa diatasi dan kesempatan sosial dapat dimaksimalkan dalam kesejahteraan dari sisi .kondisi ekonomi. Informan yang ketiga Ibu NRI tidak dapat mengelola permasalahan sosialnya dengan baik Karena kebutuhan manusia belum dapat dipenuhi yaitu ekonomi dari pendapatan saat ia bekerja dan terkena dampak ibu stroke akibat relokasi menjadikan ia tidak berdaya, hal ini dapat teratasi bila ada dua partisipasi yang baik dari UPT dan ibu NRI sehingga kemampuan yang dimiliki oleh ibu dapat didorong oleh UPT, seperti hal dasar pembuatan makanan yang dapat dipasarkan kedalam rapat – rapat UPT atau pengelola atau pemda DKI sehingga ada solusi – solusi dari setiap permasalahan. Dalam ketiga masalah informan yang diungkapkan bagaimana modal, kemampuan, serta sikap pemikiran mereka saat berpengaruh terhadap stabilitas sosial saat setelah dilakukan relokasi yang menghasilkan dampak dalam kesejahteraan ekonomi.

Sedangkan Analisa ke dua konsep dari Tiwari disebut individu itu sejahtera apabila didapatkan yang disebutkan kesehatan dan kesejahteraan dimana didalamnya termasuk makanan, pakaian, perumahan, perawatan kesehatan serta pelayanan sosial, sehingga dalam konteks kesejahteraan yang dimaksud oleh penelitian ini bagaimana masyarakat mendapatkan standar kehidupan yang memadai kesejahteraan dirinya dan keluarga, mendapatkan fasilitas sesuai standar pemenuhan kebutuhan hidup sehari – hari, pada informan bapak SRD bahwa terpenuhinya standar ke-

hidupan yang sejahtera memiliki kebutuhan sandang pangan dan papan, telah didapatkan dengan baik dan terpenuhi setelah mereka berpindah dibantu dengan anak yang kerja dan memberikan bantuan modal dalam berdagang, dengan adanya relokasi pengakuan-nya saat ini roda ekonomi keluarga berjalan, istrinya membantu – bantu sebagai penjual daging lepas, dimana bila ada pesanan ia bisa mengurus kebutuhan daging pembeli dipasar jatinegara barat. Pak SRD juga mengatakan bahwa yang ia dapatkan saat ini jauh lebih baik dibanding di kampung pulo seperti rumah, air serta kesehatan dan pelayanan sosial sehingga dapat dikatakan bahwa informan tergolong individu dan keluarga yang mengalami peningkatan kesejahteraan, perubahan dalam dirinya dan keluarga dinyatakan dengan baik dan sadar hanya, lagi – lagi permintaan ganti rugi itulah yang menjadi dasar bahwa kebaikan yang dirubah tidak terlihat sehingga kondisi ekonomi seakan – akan mengalami kemerosotan. Informan ibu WRI dalam konsep ini sudah mendapatkan kondisi yang baik hanya kekurangan modal menjadi penyebab usaha konveksinya tidak berjalan lancar, kondisi sosial yang lebih baik diakuninya pendapatan yang kurang menentu dan tidak dapat menyisihkan uang sebagai dasar bahwa keuangan keluarganya kurang beruntung, dalam kondisi ekonomi yang terpenuhi kebutuhan dasar mereka sebagai indikator sejahtera untuk saat ini berada kategori cukup, suami yang masih kerja menjahit dengan orang lain atau ikut kerja menjadi tulang punggung keluarga dan dari pelayanan sosial mereka menerima seperti kesehatan dengan adanya BPJS dan anak sekolah dengan adanya KJP serta menggunakan transportasi umum busway dan sarana KWK yang terintegrasi membantu meringankan beban ekonomi

yang mereka harus tanggung setiap bulan-nya. Informan ibu NR berada dalam ancaman kondisi ekonomi yang terus mengalami penurunan kehilangan pekerjaan saat ini membuatnya didalam unit rusun tidak memiliki kemampuan membeli, tunggakan yang terus bertambah menjadikannya beban walaupun saat ini tidak ada pengosongan atas kelalaian pembayaran yang dilakukan “diperingati dan disarankan membayar dengan mencicil” pengakuan dari yang bersangkutan. Disini ternyata juga ada perilaku yang kurang pantas meminta bantuan dari Baiz Jakarta berupa sumbangan untuk pembayaran unit sewa, walaupun pembayaran ini dilakukan dengan seleksi sangat ketat, tetapi dengan seperti itu kemandirian warga untuk dapat bertahan hidup dari kondisi ekonomi mengalami pengaruh yang negative mereka akan terbiasa mencari bantuan dan itu terjadi dengan beberapa informan. Hal ini setelah dikonfirmasi dengan dinas perumahan dan gedung melalui bagian perencanaan teknis perumahan rakyat dan kawasan pemukiman juga tidak mengetahui, membangun pemikiran agar sejahtera dalam kondisi ekonomi harus ditanamkan dengan memberikan bimbingan dan intervensi dalam kebijakan agar dapat dipatuhi, masyarakat harus dilibatkan dalam pengembangan dan pemecahan masalah kehidupan mereka, pemda DKI perlu memberikan bimbingan sebelum mereka direlokasi menginformasikan dampak – dampak positif yang akan dihasilkan dengan demikian mereka mempunyai gambaran dan langkah untuk meneruskan hidup mereka setelah direlokasi.

Pemberdayaan oleh UPT jatinegara untuk warga dalam peningkatan ekonomi sudah dilakukan dengan cara mencari tenaga pengamanan yang dibuka secara terbuka dengan gaji setara upah minimum kota Jakarta sebe-

sar Rp. 3.100.000 diharapkan mereka dapat membantu ekonomi keluarga dan tidak menunggak dalam pembayaran sewa serta menjadi dampak perubahan lingkungan warga rusun.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dampak relokasi terhadap kesejahteraan warga dari sisi kondisi ekonomi didapatkan kesimpulan bahwa dampak kondisi ekonomi yang seharusnya membawa kebaikan, tergeser oleh akal sehat pemikiran secara logika dikalahkan dengan ganti rugi yang diutamakan tersebut belum menjadi hal yang diutamakan bagi warga kampung pulo, bila dihitung apa yang mereka dapatkan mulai dari KJP untuk sekolah anak mereka dan saat KJP ini juga bisa digunakan membeli daging, gratisnya transportasi umum yaitu busway dan bus sekolah yang berangkat dari rusun, pelatihan-pelatihan meningkatkan kemampuan seperti menjahit, membuat kue, pemberdayaan dari rumah susun mencari tenaga pekerja harian lepas untuk keamanan diutamakan warga rusun dengan syarat tertentu. itu semua berdampak pada kondisi ekonomi mereka. hanya saja mereka melihat aspek penataan dan pengurusan merupakan suatu hal yang mengganggu mereka berada di zona nyaman, perlu diketahui saat ini daftar tunggu untuk dapat tinggal di rumah susun di DKI Jakarta menembus 8.000 Kepala Keluarga mereka rela untuk mengantri dan mengganggu sedangkan masih banyak pekerjaan rumah yang terus menumpuk, mulai dari kebijakan, pengembangan komunitas hingga membangun pemikiran yang benar mengenai dampak relokasi. Kemandirian yang diharapkan dan peningkatan kemampuan ekonomi agar warga yang direlokasi dapat berubah dan

mau pindah secara sukarela melihat hal positif yang akan dirasakan baik sendiri maupun keluarga.

Rekomendasi yang disampaikan adalah pertama revisi mengenai peraturan kebijakan PERGUB No.111 Tahun 2014 mengenai rumah susun atas, lama warga menepati rusun, perlu dievaluasi minimal 5 sampai 10 tahun pertama, yang dilihat dalam evaluasi itu adalah sensus ekonomi, memiliki kendaraan unit ber AC atau bahkan memiliki mobil apabila mengalami perubahan maka dapat direkomendasikan mendapatkan kredit fasilitas rumah di daerah penyangga Jakarta seperti Bogor, Tangerang dan Bekasi. Kedua perlu adanya kader-kader yang dibina dari masyarakat dijadikan tenaga kerja lepas harian dimana tugasnya adalah mentoring, melakukan bimbingan terhadap warga Jakarta yang akan direlokasi karena dari kader-kader itulah yang merasakan dampaknya. Mereka akan cerita dari pengalaman yang positif dijadikan rolemodel sehingga masyarakat mengetahui dampak yang baik sampai yang buruk dan bagaimana mengatasinya, sehingga sentuhan sisi kemanusiaan lebih terjalin, hal ini digunakan sebagai modal sosial untuk warga yang akan direncanakan untuk relokasi ke rumah susun. Ketiga jangan dilibatkan dana atau bantuan sosial yang sifatnya kurang membangun masyarakat seperti baiz, mereka akan menjadi malas dan kurang dapat bertanggungjawab terhadap hidupnya sendiri karena akan terbentuk pola pemikiran meminta bantuan saja dibanding berusaha dan bekerja. Keempat perlu kajian akademis mengenai jumlah pantas untuk membayar sewa, dikarenakan belum ada kajian akademis yang membahas kemampuan membayar warga DKI Jakarta dalam relokasi (hal tersebut sudah dikonfirmasi ke Dinas Perumahan

DKI), kajian tersebut juga dapat menyiapkan masyarakat dalam mengalami perubahan dan intervensi yang perlu dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta, tepatnya kajian ilmu yang digunakan yaitu kesejahteraan sosial perubahan berencana dimana disepakati oleh keduanya menuju tujuan yang diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I.R (2015). *Kesejahteraan Sosial*, Jakarta:Rajagrafindo Persada
- Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, (2015 NO:1101002.31), *Housing and population density data* <http://jakarta.bps.go.id/backend/pdf.../Statistik-Daerah--Provinsi-DKI-Jakarta-2015.pdf>
- David J. Edelman and Menelaos Triantafillou (2013), *Sustainable Chinese urban development*, article *environment and urbanization ASIA* 4(1) pp 1 – 29 2013, (sagepublications) database.
- Edward J.Martin & Matthew S.Pimental (2014), *Social Analysis, social justice and welfare stated: Post Great Recessi-on social welfare policy*, *Global Virtue Ethics Review* Volume Seven Number one pp 95 – 121 2014, (Proquest) database.
- Fahrudin, Adi (2012). *Kesejahteraan Sosial Internasional*, Bandung:Alfabeta
- Keputusan Menteri Negara Perumahan dan Permukiman No. 10/KPTS/M/1999 tentang Kebijakan dan Strategi Pembangunan Rumah Susun.
- Neuman, W Lawrence (2013). *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan kuantitatif* (Edina T Sofia) Jakarta: PT Indeks
- Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2014 tentang Mekanisme Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa.
- Rubin & Babbie (2010). *Research Methods for social work*, seventh edition, USA: Brooks / cole cengage Learning.
- Taylor, S.J & Bogdan, R & DeVault M.L (2016). *Introduction to qualitative research methods, A guidebook and resource*, USA: Wiley
- Tiwari Indra P (2013), *State welfarism and social welfare in ASIA*, *Journal of arts and Humanities (JAH)*, Volume 2 No 2 March 2013, (Proquest) database.